

---

## Menghadapi Liberalisasi Pendidikan Tinggi melalui Daya Saing Bangsa

---

**Heri Erlangga**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan Bandung  
Kampus, Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung 40261, e-mail : info@fisip-unpas.org

### **ABSTRACT**

*The low of education ability in Indonesia in generating output of human resources quality begins in the state of education that have not the ability to formulate the education curriculum in accordance with market needs. Strategies for dealing with the liberalization of education is people must have invited a more open mind that the function of higher education services is a shared responsibility between government, local government and community. Other strategies that should be taken by higher education in Indonesia is through the approach to quality assurance and accreditation in accordance with international standards. In addition, the role of government in issuing an integrated policy to create link and match between education and in accordance with the corporate world. So the more open that the task of higher education is not only a result of education, or understanding services as the tertiary industry in the concept of economists, but also a forum for "to preserve national identity", "to sustain and develop the intellectual and cultural base of the society", "to give inspiration and pride to citizens", dan "to promote dialoge for the respect of cultural and social diversity".*

**Keywords:** Higher Education Liberalization

### **PENDAHULUAN**

Daya saing bangsa hanya bisa dicapai apabila terdapat fondasi kesatuan dan persatuan bangsa yang kuat. Pendidikan dari mulai dasar, menengah sampai perguruan tinggi dapat menjalankan peran yang signifikan menjadi pemersatu bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan memberikan kesempatan yang luas bagi seluruh bangsa, penelitian yang mampu menggali potensi lokal dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Meskipun pertumbuhan angka partisipasi kasar jumlah pelajar di Indonesia mengalami peningkatan menjadi di atas 14 persen pada tahun 2008, akan tetapi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya posisi tersebut masih tergolong rendah. Kesempatan

untuk mengikuti pendidikan tinggi dan jumlah mahasiswa harus ditingkatkan secara kontinyu dan merata, agar mampu menghasilkan lulusan dalam jumlah yang memadai untuk mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa. Peningkatan kuantitas tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kualitas dan relevansi yang tinggi. Tanpa kedua aspek tersebut para lulusan yang dihasilkan akan menjadi penganggur intelektual.

Pembangunan pendidikan nasional 2005-2009 (Depdiknas, 2006) dititikberatkan kepada pencapaian tiga hal berikut ini. *Pertama*, meningkatkan pemerataan dan perluasan akses bagi semua warga negara; *Kedua*, meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan dalam rangka menjawab kebutuhan pasar kerja, serta

pengembangan iptek untuk memberikan sumbangan secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; *Ketiga*, meningkatkan kinerja pengelola pendidikan dengan jalan meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan layanan pendidikan secara otonom.

Sebagai perbandingan dengan Tahapan Pembangunan Pendidikan Nasional Periode 2010-2014 yang bertemakan "Penguatan Pelayanan Mengedepankan Strategi Umum Pembangunan Pendidikan": *Pertama*, Pendidikan dan Tenaga Kependidikan; *Kedua*, Pembelajaran dan Penilaian; *Ketiga*, Sarana dan Prasarana; *Keempat*, Pendanaan (peserta didik dan warga belajar); *Kelima*, Tata Kelola.

Mengapa perlu kita memahami serta mendalami grand design pembangunan pendidikan dalam era liberalisasi, karena bentuk dan rona pendidikan tinggi di Era Perdagangan Bebas semakin perlu kita pahami setelah adanya penandatanganan *General Agreement on Trade in Service (GATS)* oleh negara-negara anggota WTO pada akhir bulan Mei 2005 yang mengatur liberalisasi perdagangan 12 sektor jasa, antara lain layanan kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, jasa akuntansi, pendidikan tinggi dan pendidikan selama hayat, serta jasa-jasa lainnya.

Sejalan dengan pandangan ilmu ekonomi, WTO menetapkan pendidikan sebagai salah satu industri *sector tertier*, karena kegiatan pokoknya adalah mentransformasi orang yang tidak berpengetahuan dan orang tidak punya keterampilan menjadi orang berpengetahuan dan yang punya keterampilan. Kontribusi sector tersier terhadap produk nasional suatu bangsa memang cenderung meningkat seiring dengan kemajuan pembangunan bangsa tersebut. Di negara-negara maju, perdagangan jasa tumbuh pesat dan telah memberikan sumbangan yang besar pada produk domestik bruto (PDB), lebih besar dibandingkan dengan sector primer dan sekunder.

Sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk di atas 210 juta jiwa dengan tingkat partisipasi pendidikan tinggi hanya sekitar 14 persen dari jumlah penduduk usia 19-24 tahun, Indonesia ternyata menjadi incaran negara-negara eksportir jasa pendidikan dan pelatihan, karena perhatian

pemerintah terhadap bidang pendidikan dinilai masih rendah, secara umum mutu pendidikan nasional jauh tertinggal dari standar mutu internasional. Sekitar 6 negara telah meminta Indonesia untuk membuka sektor jasa pendidikan yakni Australia, Amerika Serikat, Jepang, Cina, Korea dan Selandia Baru. Sub-sektor jasa yang ingin dimasuki adalah pendidikan tinggi, pendidikan seumur hayat, dan pendidikan vocational dan profesi. Cina bahkan minta Indonesia membuka pintu untuk pendidikan kedokteran Cina.

Sangat terasa dengan perkembangan tersebut, betapa tingkat persaingan sumber daya manusia di pasar kerja nasional maupun internasional terus meningkat seiring dengan peningkatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi baru pada berbagai bidang dunia usaha, serta kebutuhan tingkat profesionalisme (*knowledge, hard skills, soft skills*) yang semakin tinggi. Usaha peningkatan kualitas lulusan di Indonesia berbeda dengan masa sebelumnya karena pasar terbuka (*open market*) telah menyebabkan penetrasi tenaga kerja luar negeri akan semakin besar, sehingga persaingan di tingkat nasional tidak lagi terjadi hanya antar lulusan nasional saja, melainkan juga antar lulusan nasional dengan lulusan luar negeri.

Kompetisi pencari kerja dari lulusan sekolah di Indonesia yang semakin ketat menuntut perhatian penyelenggara pendidikan untuk selalu melakukan penyesuaian kurikulum, proses dan materi pembelajaran terhadap perkembangan dunia kerja. Peningkatan relevansi pendidikan ini sebaiknya menjadi sasaran dari peningkatan kualitas yang terus menerus (*continuous quality enhancement*) sebagai bagian dari suatu sistem penjaminan mutu (*quality assurance system*) pendidikan secara keseluruhan. Dalam hal ini, aspek relevansi menuntut penyelenggara pendidikan tinggi untuk mengembangkan program studi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Kualitas dan relevansi merupakan dua aspek pendidikan yang saling berkaitan dan mempunyai kontribusi langsung pada peningkatan daya saing bangsa dalam bidang sumber daya manusia. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan merupakan pekerjaan yang cukup kompleks, karena menyangkut banyak faktor seperti

kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan, kualitas sarana dan fasilitas pendidikan, sistem pengelolaan pendidikan, dan suasana akademik yang tercipta di dalam proses pendidikan masing-masing dapat mengupayakan *cooperation*, *benchmarking*, *networking* atau berbagai usaha lain, sehingga dapat memanfaatkan *lesson learned* dan *best practices* dari sekolah lain.

Rendahnya mutu pendidikan, sebagai contoh pendidikan tinggi di Indonesia ditunjukkan oleh data hasil survey yang dilakukan *Shanghai Jiao Tong Institute of Higher Education* melaporkan 500 perguruan tinggi peringkat atas di dunia, dan 100 perguruan tinggi peringkat atas di Asia. Dalam peringkat itu, Malaysia (2 PT); India (1 PT); China (5 PT); Australia (15 PT); Jerman (17 PT); Perancis (8 PT); Jepang (6 PT); Amerika Serikat (62). Indonesia tidak ada satupun yang masuk peringkat. Hal yang sama terungkap pula dalam hasil survey majalah *Times* edisi November 2004 mengenai 200 PT peringkat atas di dunia. Asia Tenggara yang masuk peringkat adalah : NUS (ke-18); Nanyang University (ke-50); Malay University (ke-89); dan Sains Malaysia (ke-111). Perguruan tinggi Indonesia (UGM) mulai masuk peringkat ke-56 dari 100 terbaik di bidang ilmu budaya dan humaniora.

Kualitas dan relevansi lulusan pendidikan tinggi, masih menjadi faktor utama lemahnya daya saing bangsa di kancah perdagangan bebas. Bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini kita abaikan. Indonesia dalam kancah persaingan global menurut *World Competitiveness Report* menempati urutan ke-45 atau terendah dari seluruh negara yang diteliti, di bawah Singapura (8), Malaysia (34), Cina (35), Filipina (38), dan Thailand (40).

Masih rendahnya kemampuan pendidikan di Indonesia dalam menghasilkan keluaran sumber daya manusia yang berkualitas berawal pada kondisi pendidikan yang tidak memiliki kemampuan dalam memformulasikan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, peran pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang terintegrasi untuk terciptanya *link and match* antara pendidikan dengan dunia usaha belum sepenuhnya dijalankan. Data Ditjen Dikti Depdiknas (Kompas,

6 Februari 2008) menjelaskan bahwa jumlah sarjana menganggur melonjak drastis dari 183.629 orang pada tahun 2006 menjadi 409.890 orang pada tahun 2007, ditambah dengan pemegang gelar diploma I,II, dan III yang menganggur berdasarkan pendataan tahun 2007 lebih dari 740.000 atau sekitar di atas 6% jumlah pengangguran di Indonesia disumbang oleh kelompok terdidik yang berpendidikan, sedangkan dari lulusan SMP di atas 22, 30%, SMA di atas 36,64%. Kondisi ini jelas telah terjadi *mismatch* atau ketidaksesuaian antara lulusan sekolah dan kualifikasi yang dibutuhkan sektor industri dan jasa di masyarakat, akibatnya timbul masalah ketika lulusan tersebut ingin mencari pekerjaan.

### **Strategi Menghadapi Liberalisasi Pendidikan**

Liberalisasi pendidikan tinggi yang sedang terjadi melalui jalur pasar bebas memang harus dihadapi dengan sangat hati-hati oleh negara-negara berkembang, tak terkecuali Indonesia. Implikasi jangka panjang dari liberalisasi pendidikan tinggi tersebut belum sepenuhnya dapat diprakirakan, dan karena itu kebijakan-kebijakan antisipatif perlu dirancang dengan secermat mungkin agar liberalisasi tersebut jangan sampai menghancurkan sektor pendidikan tinggi.

Menyikapi liberalisasi pendidikan tinggi, masyarakat pendidikan tinggi Indonesia, baik pemerintah maupun masyarakat harus mengambil sikap terbuka dan positif. Di seluruh dunia memang sedang terjadi perkembangan, walaupun dengan kecepatan yang berbeda-beda antar negara, menuju deregulasi pendidikan tinggi. Masyarakat sudah mulai harus diajak ke arah lebih terbuka bahwa fungsi layanan pendidikan tinggi merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, dan masyarakat. UU Sisdiknas sudah menganut paradigma seperti itu. Dengan demikian lembaga-lembaga swasta perlu diberi kesempatan yang besar dalam penyediaan layanan tersebut. Kesempatan yang sama perlu juga dibuka untuk lembaga pendidikan komersial dari luar negeri, tetapi dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan nasional.

Strategi lain yang perlu ditempuh oleh pendidikan tinggi di Indonesia adalah melalui pendekatan jaminan mutu dan akreditasi sesuai

standar internasional. Kegiatan akreditasi nasional perlu dilanjutkan dengan program akreditasi internasional terhadap program studi dan unit penyelenggara kegiatan pendidikan tinggi seperti jurusan. Melalui program tersebut diharapkan pengakuan internasional terhadap perguruan tinggi Indonesia akan semakin meningkat.

Selanjutnya perlu ditempuh oleh Indonesia adalah meningkatkan sistem akreditasi nasional menjadi sistem akreditasi regional dengan memanfaatkan jaringan perguruan tinggi regional, Asean University Network (AUN) dan Association of Southeast Asian Institut of Higher Learning (ASAIHL) untuk mengembangkan sistem akreditasi regional. Southeast Asia Ministry of Education Organization (SEAMEO) sebagai organisasi para menteri pendidikan adalah badan regional yang paling tepat untuk berfungsi sebagai kekuatan moral dan mempunyai legitimasi untuk mendorong program akreditasi regional tersebut. Apabila program akreditasi regional dapat berjalan dengan baik, mungkin tidak terlalu sukar transisi ke program akreditasi internasional yang akan lebih memperbesar akses ke masyarakat internasional.

Dengan demikian semakin terbuka bahwa tugas pendidikan tinggi bukan semata-mata menghasilkan tenaga terdidik, atau pengertian jasa sebagai industri tersier dalam konsep para ekonom, tetapi juga adalah lembaga untuk "to preserve national identity", "to sustain and develop the intellectual and cultural base of the society", "to give inspiration and pride to citizens", dan "to promote dialogue for the respect of cultural and social diversity". Tujuan-tujuan nasional yang penting tetap menjadi tanggungjawab bangsa Indonesia karena tidak mungkin mendapat perhatian sepenuhnya dari penyedia jasa pendidikan komersial luar negeri. Hal itu adalah bagian dari strategi daya saing bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN Secretariat. *ASEAN framework agreement on service*. Jakarta. Asean Secretariat. 1995.
- Badan Akreditasi Nasional. (2008). *Standar Penilaian Akreditasi Perguruan Tinggi*. Jakarta. BAN-Pusat.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Rencana Strategis 2004-2009*. Jakarta. Depdiknas, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti. (2004). *Strategi Jangka Panjang Pendidikan Tinggi 2003-2010 (HELTS); Mewujudkan Perguruan Tinggi Berkualitas*. Jakarta. Depdiknas Republik Indonesia.
- Kementrian Pendidikan Nasional, *Rencana Strategis 2010-2014*. Jakarta Kemendiknas, 2010.
- Sofian Effendi, 2005, *Strategi Menghadapi Liberalisasi Pendidikan Tinggi*, Makalah Seminar Nasional.
- Slamet, M. (2004). *Prosiding Lokakarya : Merekayasa Jalan Menuju Transformasi Perguruan Tinggi*. Jakarta. Forum HEDS.
- Tilaar, H.A.R., dan Nugróho, R. (2008). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.